

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akutansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja Instansi (*Performance Accountability Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan juga Rencana Strategis tahun 2016-2021. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi di masa yang akan datang.

Untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi. Permen ini memberikan tuntutan kepada kita untuk menyiapkan Laporan KinerjaPemerintah sebagai bagian integral dari siklus kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi Laporan Kinerja pertama sebagai laporan kinerja yang merupakan media bagi Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua sebagai laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi sebagai usaha untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyampaian Laporan Kinerja sebagai berikut :

1. Aspek Kinerja

Untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja sebagai media pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, dan tujuan serta sasaran telah dicapai.

2. Aspek Manajemen Kinerja

Untuk keperluan internal organisasi menjadikan Laporan Kinerja sebagai media evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah bagi usaha perbaikan kinerja dimasa datang.

Dalam Laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan beserta sumber pembiayaan yang bersifat strategis. Data kegiatan pembangunan tersebut dari APBD tahun anggaran 2018, serta isi dari Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama satu tahun. Capaian Kinerja tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah kelemahan yang selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja dimasa datang.

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 8 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 adalah :**MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN TUGAS PEMBANTUAN YANGDITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

1.3.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan fakir miskin dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas SosialDukcapil 2018

2. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan dinas;
5. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas yang membidangi sosialdi kabupaten/kota;
6. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas SosialDinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tenaga Propinsi Jambi yang secara operasional dilaksanakan oleh Bidang dan Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

SEKRETARIAT		FUNGSI	ORGANISASI PELAKSANA
<p>meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan penataan asset dinas.</p>	1.	Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas.	1. Sekretariat
	2.	Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,asset, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumen dinas.	2. Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
	3.	Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.	3. Sub Bag Keuangan dan Aset.
	4.	Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan	4. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

	<p>kesekretariatan.</p> <p>5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.</p> <p>6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan asset dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.</p> <p>7. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan.</p> <p>8. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.</p> <p>9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.</p> <p>10. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.</p> <p>11. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dan kerjasama dengan SKPD terkait dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan.</p> <p>12. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas.</p> <p>13. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dan</p> <p>14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atas sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
--	---	--

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		ORGANISASI PELAKSANA
	rencana	1. Bidang Pemberdayaan Sosial
	bidang sosial	2. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
	edoman	3. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kelembagaan Sosial
	kan di rdayaan	4. Seksi Pemberdayaan
pemantauan, evaluasi dan sosial.		

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

pelaporan pelaksanaan kebijakandibidang pemberdayaan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan kebijakn di bidang pemberdayaan sosial. 4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang pembedayaan sosial.. 5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisidi bidang pemberdayaan sosial. 6. Pemantauan, evaluasidan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial. 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.. 	Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
--	---	--

TUGAS POKOK	FUNGSI	ORGANISASI PELAKSANA
BIDANG REHABILITASI SOSIAL penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, sosialisasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabiliotasi sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang. 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan perdagangan orang. 4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang. 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. 4. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

	dan korban perdagangan orang. 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.	
--	--	--

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

TUGAS POKOK	FUNGSI	ORGANISASI PELAKSANA
Membantu dinas dalam rangka melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerapan norma, n standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan rencana kegiatan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial. 3. Perumusan pelaksanaan di bidang perlindungan dan jaminan sosial. 4. Pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial. 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan dan jaminan sosial. 6. Pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial. 7. Pelaksanaan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan instansi terkait. 8. Pemberian tugas, menyedia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. 4. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

	<p>jaminan sosial.</p> <p>9. Pelaksanaan dan penilaian kinerja pegawai pada bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya.</p> <p>10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang perlindungan dan jaminan sosial.</p> <p>11. Pelaporan hasil kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada atasan.</p> <p>12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
--	--	--

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN		ORGANISASI PELAKSANA
dan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penanganan fakir miskin.	<p>naan hubungan</p> <p>2. industrial dan persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, purna kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.</p> <p>3. Melaksanakan pembinaan , pengembangan dan pengawasan lembaga ketenagakerjaan</p> <p>4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga Kerja.</p>	<p>1. Bidang Penangan Fakir Miskin.</p> <p>2. Seksi Penangan Fakir Miskin Pedesaan.</p> <p>3. Seksi Penangan Fakir Miskin Perkotaan.</p> <p>4. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Daerah Tertinggal dan Perbatasan Antar Provinsi.</p>

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		ORGANISASI PELAKSANA
Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.	<p>1. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangandaerah provinsi.</p> <p>2. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kab</p>	<p>1. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>2. Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.</p> <p>3. Seksi fasilitasi Pencatatan Sipil</p> <p>4. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan (PIAK)</p>

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

	<p>upaten/kota.</p> <p>3. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.</p> <p>4. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.</p> <p>5. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik Negara direktoral kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.</p> <p>6. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.</p> <p>7. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.</p> <p>9. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan</p>	<p>dan Pemanfaatan data.</p>
--	---	------------------------------

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

	<p>informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.</p> <p>10. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.</p> <p>11. Pemberian bantuan teknis dan supervise di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.</p> <p>12. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.</p> <p>13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
--	--	--

UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT)

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 44. Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai 2 UPTD yaitu :

1.	P
anti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Luhur	
2.	P
anti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) Harapan Mulya.	

Pada tahun 2018, berdasarkan Pergub Nomor 41 dan 42 UPT tersebut berubah Nomenklatur menjadi

1.	Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Luhur
2.	Panti Sosial Bina Anak, Wanita dan Eks Psikotik (PSBAWEP) Harapan Mulya.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang secara operasional dilaksanakan oleh masing-masing dan Panti yang dapat diuraikan sebagai berikut :

UPTPANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) BUDI LUHUR		
		PELAKSANA
Melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dibidang pelayanan dan perawatan jasmani rohani lanjut usia terlantar	1. Melaksanakan pelayanan lanjut usia terlantar 2. Melaksanakan pemberian informasi usaha kesejahteraan sosial khususnya lanjut usia	1. Ka. UPTD 2. Subbag Tata Usaha 3. Kasi PAS 4. Kasi Pelayanan dan Rehabsos 5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTPANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA DAN EKS PSIKOTIK (PSBAWEP) HARAPAN MULYA

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

kewenangan yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dibidang pelayanan kesejahteraan sosial remaja putus sekolah dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap eks PSK serta pelayanan Rehabilitasi Sosial kepada Eks Psikotik	<p>kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja dan wanita tuna sosial serta Eks psikotik</p> <p>2. Melaksanakan pemberian informasi dan konsultasi kesejahteraan sosial.</p> <p>3. Melaksanakan pengembangan kesejahteraan sosial</p>	<p>2. Subbag Tata Usaha</p> <p>3. Kasi PAS</p> <p>4. Kasi Pelayanan dan Rehabsos</p> <p>5. Kelompok Jabatan Fungsional</p>
--	--	--

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

KASUBAG
KEUANGAN DAN
ASET

KASUBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG
PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN
SOSIAL

BIDANG
REHABILITASI
SOSIAL

BIDANG
PEMBERDAYAAN
SOSIAL

BIDANG
PENANGANAN
FAKIR MISKIN

BIDANG
KEPENDUDUKAN
& PENCATATAN
SIPIL

SEKSI
PERLINDUNGAN
KORBAN
BENCANA ALAM

SEKSI
REHABILITASI
SOSIAL ANAK &
LANJUT USIA

SEKSI
PEMBERDAYAAN
SOSIAL PERORANGAN
& KELUARGA

SEKSI
PENANGANAN
FAKIR MISKIN
PERDESAAN

SEKSI FASILITASI
PENDAFTARAN
PENDUDUK

SEKSI
PERLINDUNGAN
KORBAN
BENCANA SOSIAL

SEKSI REHABSOS
PENYANDANG
DISABILITAS

SEKSI
PEMBERDAYAAN KAT
DAN KELEMBAGAAN
SOSIAL

SEKSI
PENANGANAN
FAKIR MISKIN
PERKOTAAN

SEKSI FASILITASI
PENCATATAN
SIPIL

SEKSI JAMINAN
SOSIAL
KELUARGA

SEKSI REHABSOS
TUNA SOSIAL &
KORBAN
PERDAGANGAN
ORANG

SEKSI
PEMBERDAYAAN
POTENSI
KESETIAKAWANANAN
& RESTORASI SOSIAL

SEKSI
PENANGANAN
FAKIR MISKIN
PESISIR

SEKSI
PENGELOLAAN
ADMINDUK

UPT

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

1.4. Sumber Daya Aparatur

1.4.1 Sarana dan Prasarana.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tampak pada Tabel berikut :

TABEL 1.4.1
SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSDUKCAPIL
PROVINSI JAMBI

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Keterangan
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG I.DINAS		
	➤ Gedung Kantor Dinas Sodikcapil Provinsi Jambi	6 Unit	Kondisi Bangunan Cukup Baik
	➤ Rumah Dinas (Kepala)	1Unit	Kondisi belum baik (Perlu direhab)
	➤ Pos jaga	1 Unit	Baik
	➤ Gudang	2 Unit	Baik
	II. PSBAWEP		
	➤ Gedung kantor	9 Unit	Aula, Tempat praktek, tempat tinggal Klien (perlu direhab). Aula, Tempat praktek,tempat tinggal Klien (perlu direhab)
	➤ Musholla	2 Unit	Baik.
	➤ Aula	2 Unit	Perlu Rehab
	➤ Wisma	11 Unit	Baik
	➤ Rumah Dinas	4 Unit	Perlu Rehap
	➤ Asrama	5 Unit	Baik
	III. PSTW		
	➤ Gedung kantor	1 Unit	Perlu Rahap
	➤ Musholla	1 Unit	Baik
	➤ Aula		

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wisma ➤ Rumah Dinas ➤ Asrama ➤ Garasi ➤ Gedung Klinik 	1 Unit 15 Unit 7 Unit 1Unit 1Unit 1Unit	Perlu Rehab Baik Baik Baik Baik Baik
B.	PERALATAN DAN MESIN <ul style="list-style-type: none"> • Alat angkutan kendaraan roda 4 • Alat angkutan kendaraan roda 2 • Alat-alat bengkel dan alat-alat ukur • Alat Studio dan Komunikasi • Jaringan irigasi dan jaringan 	17 Unit 20 Unit 96 Unit 32 Unit	Tahun 1997 s/d 2016 Tahun 1992 s/d 2016 Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2007 s/d 2012

1.4.2 Dukungan Personil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak **149 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :



Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

TABEL 1.4.2.

**JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT KEPANGKATAN)**

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1 orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	0 orang
	Pembina Tk. I	IV-b	5 orang
	Pembina	IV-a	9 orang
III	Penata Tk. I	III-d	39 orang
	Penata	III-c	14 orang
	Penata Muda Tk. I	III-b	51 orang
	Penata Muda	III-a	8 orang
II	Pengatur Tk. I	II-d	3 orang
	Pengatur	II-c	4 orang
	Pengatur Muda Tk. I	II-b	5 orang
	Pengatur Muda	II-a	1 orang
I	Juru Tk. I	I-d	0 orang
	Juru	I-c	5 orang
	Juru Muda Tk. I	I-b	0 orang
	Juru Muda	I-a	0 orang
Jumlah			149 orang

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

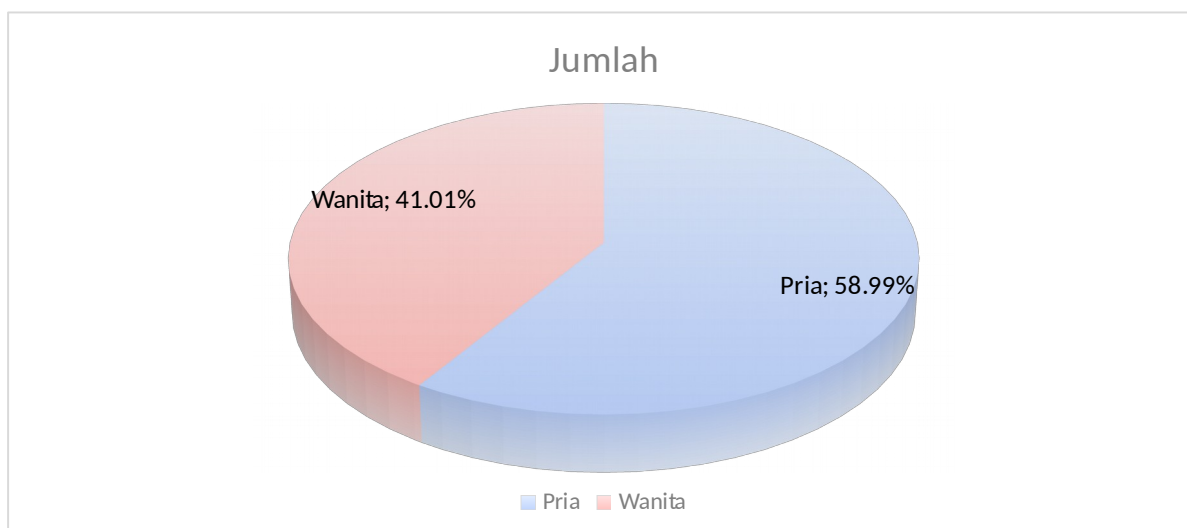
TABEL 1.4.2.

**JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)**

Tingkat Pendidikan	Banyaknya
Sekolah Dasar	2 orang
Sekolah Menengah Pertama	6 orang
Sekolah Menengah Atas/Sederajat	57 orang
Diploma 1	0 orang
Diploma 2	0 orang
Diploma 3	4 orang
Diploma 4	0 orang
S-1	62 orang
S-2	18 orang
S-3	0 orang
Jumlah	149 Orang

Sumber :Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosdukcapiil Prov.Jambi, 2018

Grafik : Jumlah PNS Dilingkungan Dinas Sosdukcapiil Provinsi Jambi (Keadaan : bulan Desember 2018)



Pria 86 orang
Wanita 63 orang

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

1.4.3 Mitra Kerja.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai mitra kerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 1.4.3
MITRA KERJA DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI

No	MITRA KERJA	JUMLAH
1	2	3
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1135 Orang
2	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	55Desa/ Kel
3	Organisasi Sosial (Orsos)	243Organisasi
4	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	820 Orang
5	Karang Taruna	1202 orang
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	130orang

1.5 SISTEMATIKA LKJ

Sistematika dalam penyusunan laporan akuntabilitas ini disajikan dengan data kegiatan yang bersumber dari pembiayaan yang bersifat strategi, yaitu data kegiatan pembangunan APBD Tahun Anggaran 2018. Strategi disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

• **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pada bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategismaupun penetapan kinerja serta sejauh mana Dinas Sosial, kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

➔ **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

➔ **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

➔ **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.

➔ Bab IV. PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

➔ Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2.) Lain-lain yang di anggap perlu.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia secara umum telah menunjukkan kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Permasalahan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah masih menjadi “momok” yang dihadapi bangsa kita, oleh karenanya berbagai kebijakan yang mengarah kepada pengentasan dan penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan antar wilayah secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat, selain itu, tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang lebih baik merupakan amanat yang harus dijalankan, karena hal itu merupakan konsekuensi diselenggarakannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2004, dimana dalam era otonomi tersebut pemerintah dituntut untuk dapat melakukan berbagai upaya dan terobosan sesuai dengan potensi, keunggulan dan kemampuan yang dimiliki daerah agar dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi dengan benar, sesuai dengan prinsip keterbukaan, transparans dan akuntabel.

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh kedepan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka Visi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang ingin di capai yakni :

” Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021”

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (*customer* dan *stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan peran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut:

- a. **Misi 1 :** Mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktivitas dan taraf hidup PMKS.
- b. **Misi 2 :** Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf kesejahteraan sosial.
- c. **Misi 3 :** Mendorong sinergitas dan peran serta masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. **Misi 4 :** Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.3 TUJUAN.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam bidang sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihadapi.

Adapun tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu:

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

- a. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui Pemberdayaan bagi fakir miskin.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

- b. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya.
- c. Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, baik dalam dan luar panti.
- d. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya.

2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelolaan dokumen kependudukan Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelolaan dokumen pencatatan sipil Kabupaten/Kota.
- c. Meningkatkan pengelolaan system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 SASARAN.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil di daerah Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

- a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi keluarga fakir miskin di Provinsi Jambi.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

- b. Terwujudnya pemberdayaan KAT yang produktif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
- c. Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- d. Terwujudnya peran serta organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :

- a. Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pembinaan dan penataan dokumen administrasi kependudukan.
- b. Terwujudnya kapasitas SDM pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Terwujudnya ketersediaan data kependudukan yang bias dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 adalah :

1. Bidang Sosial

- a. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui Pemberdayaan bagi masyarakat miskin, memiliki sasaran utama mengentaskan kemiskinan bagi Keluarga Fakir Miskin di Provinsi Jambi, sebesar 5,73% atau sebanyak 8.020 KK Fakir Miskin yang harus diberikan pelayanan hingga tahun 2021.
- b. Meningkatkan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya, melalui usaha pemberdayaan KAT yang produktif dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, sebesar 33,98% atau sebanyak 2.637 KAT yang harus diberikan pemberdayaan dan pelayanan sosial hingga tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

c. Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Eks. Penyakit Sosial dan PMKS sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 12,13%, hingga akhir tahun 2021, dengan sasaran :

- Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Anak terlantar hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1540 orang atau sebesar 58,89% dari total anak terlantar pada tahun 2015 sebanyak 2.607 orang.
- Pelayanan dan Pembinaan bagi Anak Jalanan hingga akhir tahun 2021 sebanyak 100 orang atau sebesar 98,43 % dari total anak jalanan pada tahun 2015 sebanyak 127 orang.
- Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar hingga tahun 2021 sebanyak 1.950 orang atau sebesar 11,71% dari total Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2015 sebanyak 16.654 orang.
- Pelayanan, Pembinaan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.020 orang atau sebesar 15,59 % dari total Penyandang Disabilitas pada tahun 2015 sebanyak 6.543 orang.
- Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Eks. Tuna Susila (PSK) hingga akhir tahun 2021 sebanyak 670 orang atau sebesar 44,67% dari total Penyandang Eks. Tuna Susila pada tahun 2015 sebanyak 1.500 orang.
- Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) atau Eks. Napi hingga akhir tahun 2021 sebanyak 196 orang atau sebesar 19,60% dari total Penyandang Eks. Napi pada tahun 2015 sebanyak 1.000 orang.
- Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga akhir tahun 2021 sebanyak 358 orang atau sebesar 17,90 % dari total ODHA pada tahun 2015 sebanyak 2.000 orang.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

- Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA, hingga akhir tahun 2021 sebanyak 4.350 orang atau sebesar 8,37% dari Korban Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2015 sebanyak 52.000 orang.
 - Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PBMS) hingga akhir tahun 2021 sebanyak 150 orang atau sebesar 53,57% dari total PBMS pada tahun 2015 sebanyak 280 orang.
 - Pelayanan dan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Alam, hingga akhir tahun 2021 sebanyak 7.900 orang atau sebesar 22,50% dari total Korban Bencana Alam pada tahun 2015 sebanyak 44.000 orang.
 - Pelayanan dan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar, hingga akhir tahun 2021 sebanyak 3.980 orang atau sebesar 39,80% dari total Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar pada tahun 2015 sebanyak 10.000 orang.
 - Penyuluhan Sosial Narkoba kepada masyarakat, pelajar dan usia potensial lainnya, hingga akhir tahun 2021 sebanyak 3.500 orang.
 - Pelayanan Panti Sosial bagi eks. Psikotik/Orang dengan Gangguan Kejiwaan sebanyak 70 orang per tahun hingga tahun 2021.
- d. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya, dengan target pemberdayaan sebesar 35% hingga akhir tahun 2021.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memiliki sasaran utama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha mendorong terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di Provinsi Jambi, dengan target pelayanan 35% hingga akhir tahun 2021.
2. Bidang Kependudukan dan Administrasi Kependudukan.
- a. Peningkatan Pengelolaan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Sipil kepada Kabupaten / Kota dengan meningkatkan kapasitas petugas

Pengelola data kependudukan dan pencatatan Sipil serta meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan Data kependudukan dan pencatatan Sipil.

- b. Meningkatkan Informasi pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pembangunan sumber daya manusia.

2.1.5 KEBIJAKAN.

Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021 adalah :

A. Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumber daya manusia pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

B. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Meningkatkan peluang kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM pengelola data kependudukan dan pencatatan sipil di instansi yang menangani kependudukan di Kabupaten/Kota

3. Meningkatkan pengelolaan system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan sesuai perundang-undangan yang berlaku

1.1.6 PROGRAM INSTANSI.

Selanjutnya pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait sebagaimana tersebut sebelumnya. Untuk mencapaisasaran yang telah dijabarkan maka dihimpun dalam bentuk kebijakan dalam program dan kegiatan. Di dalam program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Adapun cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai Adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,kinerja yangingin dicapai adalah persentase peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan Kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan program, keuangan dan asset dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Program Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya.

8. PROGRAM PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REHABILITASI BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kinerja yang ingin dicapai adalah persentase PMKS yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

9. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program Penataan Administrasi Kependudukan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.

2.2 PERJANJIAN KINERJA.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis 2016-2021 diatas, Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja 2018 sebagaimana terlampir

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA.

AkuntabilitasPengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini , maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun- tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
 - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
 - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
 - e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Analisis yang dilakukan disini berupa realisasi atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output, dan outcome. Dan apakah program/ kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum maka akan dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

3.2 ANALISIS CAPAIAN IKU.

Capaian yang telah diraih oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dapat dilihat dengan beberapa indikator tahun 2017 dan 2018, dapat diuraikan sebagai berikut :

Capaian program Tahun 2017

➤ Bidang Sosial.

- a. Bantuan dan Jaminan Sosial.
- b. Pemberdayaan Sosial.
- c. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- d. Penanganan Fakir Miskin

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017 sebagai berikut :

a. Bantuan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial.

- Memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada PACA Terlantar sebanyak 50 orang
- Mengadakan Sosialisasi Pemberdayaan Karang Taruna sebanyak 66 KT dan Sosialisasi dan Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin (pendampingan) 1.240 kk.
- Memberikan bantuan kepada orang terlantar (pemulangan) dan pengiriman ke panti di luar pulau Jawa sebanyak 30 orang.
- Memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 320 orang Anak terlantar dan Orang Dengan Kecacatan (OKD).

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

- Memfasilitasi untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha bagi 500 orang Korban Penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba dan Penyuluhan.
- Memfasilitasi untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Mental bagi 50 orang Eks. Napi WTS tidak Langsung .
- Memfasilitasi untuk mendapatkan pelayanan sosial kepada 175 orang Lanjut Usia di luar panti.
- Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) telah mengadakan Pelatihan Ketrampilan Bekerja kepada 90 orang Anak Terlantar dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi 25 orang Ex PSK/WTS.
- Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) telah memberikan Pelayanan Kebutuhan Hidup bagi 70 orang Lanjut Usia Terlantar
- Mengadakan Kegiatan Kesiapsiagaan Pemulangan Korban Bencana dan Orang Terlantar sebanyak 1.000 Orang.
- Memfasilitasi Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Anak sebanyak 25 Orang.
- Mengadakan Kegiatan Pemberdayaan KAT di Lokasi Purna Bina sebanyak 424 KK
- Memfasilitasi Anak yang mengikuti Kongres Anak sebanyak 12 Orang dan Anak yang memperoleh perlindungan khusus pemulangan dan pengiriman ke panti diluar Daerah sebanyak 10 Orang.
- Menberikann bantuan tambahan nutrisi gizi di 6 Kabupaten kepada Orang Dengan Kecacatan (ODK) Berat sebanyak 180 Orang dan bantuan Pemulangan dan pengiriman PACA ke panti sosial Sumatera dan mengikuti Rakernas PPCI,PERTAPI

b Pemberdayaan Sosial

- Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSAN) sebanyak 1 Paket
- Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial sebanyak 35 Orang.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

- Memfasilitasi kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi keluarga untuk peningkatan kesejahteraan sebanyak 35 Orang. .

c. Pemberdayaan Fakir Miskin.

- Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh pembinaan dalam mengelola sumber lokal 424 KK
- Melaksanakan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan Program Keluarga Harapan sebanyak 1 Paket dan yang mendapatkan fasilitas manajemen usaha 20.000 KK.

➔ Bidang Dukcapil

- Layanan Pendaftaran Penduduk
- Layanan Pencatatan Sipil
- Layanan Sistem Administrasi Kependudukan

Capaian program Tahun 2018

➔ Bidang Sosial.

- a. Bantuan dan Jaminan Sosial.
- b. Pemberdayaan Sosial.
- c. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- d. Pemberdayaan Fakir Miskin
- e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2018 sebagai berikut :

a. Bantuan Jaminan Sosial

- Memberikan Pelayanan Sosial kepada orang terlantar diperjalanan (pemulangan) sebanyak 982 Orang

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

- Melaksanakan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan Program Keluarga Harapan berupa kegiatan pemantapan koordinator kabupen dan Pendamping PKH sebanyak 75 orang.
- Mengadakan Kegiatan Kesiapsiagaan Pemulangan Korban Bencana dan Orang Terlantar sebanyak 1.000 Orang.
- Mengadakan Buffer Stock Gudang bencana Alam dan bencana Sosial sebanyak 1 kegiatan.

b. Rehabilitasi Sosial.

1. Melaksanakan Unit Pelayanan Sosial Keliling di Kab. Batanghari
2. Memberikan bantuan Alat bantu dan kaki palsu serta tangan palsu (Prothease) di lima lokasi yaitu Kab. Tanjab Barat, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Sarolangun dan Kab. Tanjab Timur serta Kota Jambi.
3. Memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 320 orang Anak terlantar dan Orang Dengan Kecacatan (OKD).
4. Memfasilitasi untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha bagi 500 orang Korban Penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba dan Penyuluhan.
5. Memfasilitasi untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Mental bagi 25 orang Eks.penyandang penyakit sosial bagi wanita penyandang PMKS
6. Memfasilitasi untuk mendapatkan pelayanan sosial kepada 100 orang Lanjut Usia di luar panti.
7. Panti Sosial Bina Anak, Wanita dan Eks Psikotik (PSBAWEP) telah mengadakan Pelatihan Ketrampilan Bekerja kepada 80 orang Anak Terlantar dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha khususnya tata busana /menjahit 2 angkatan , Tatarias/salon 2 Angkatan,ketrampilan Las 2 Angkatan dan Otomotif 2 Angkatan. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial kepada Wanita Eks Tuna Susila sebanyak 15 Orang dan memberikan Rehabilitasi Sosial bagi Eks Psikotik wanita sebanyak 25 Orang.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

8. Memberikan Bantuan kepada anak terlantar sebanyak 100 paket dan pemulangan dan perlindungan anak yang perlu perlindungan khusus 5 orang.
9. Melakukan Asistensi ODK melalui penyandang Disabilitas baik dari panti maupun luar panti untuk memperoleh Jaminan Kebutuhan Dasar kepada 30 orang penerima di kabupeten Kerinci.
10. Kegiatan Komda Lansia Provinsi Jambi berupa 1 (satu) Lembaga
11. Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) telah memberikan Pelayanan Kebutuhan Hidup bagi 70 orang Lanjut Usia Terlantar
12. Memberikan bantuan pengiriman PACA kepanti Sosial di Pulau Jawa dan Sumatera masing masing 12 orang, pemulangan eks klien Rehabsos Penyandang disabilitas di sumatera dan Jawa sebanyak 12 orang dan pengiriman pemulangan penyandang disabilitas Rakernas PPDl sebanyak 3 orang.

b Pemberdayaan Sosial

- Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSJ) sebanyak 1 Paket
- Memberdayakan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan melakukan pelatihan kepada 35 orang dari Kabupaten /Kota dan melakukan koordinasi Dunia Usaha dalam mendukung program Pelaksanaan CSR kepada 80 orang peserta.
- Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial sebanyak 35 Orang TKSK,PSM
- Mengadakan Kegiatan Pemberdayaan KAT di Lokasi Purna Bina sebanyak 424 KK
- Memfasilitasi kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi keluarga untuk peningkatan kesejahteraan sebanyak 35 Orang. .
- Mengadakan ,Sosialisasi Pemberdayaan Karang Taruna sebanyak 30 KT dan Sosialisasi dan Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin (pendampingan) 1.240 kk.

c. Pemberdayaan Fakir Miskin.

- Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh pembinaan dalam mengelola sumber lokal berupa Jaminan Hidup (Jadup) 116 KK selama 6 bulan di kab Tebo, kab Sarolangun, dan Kab Merangin, dengan total 342 Jadup serta melakukan bintek bagi penerima Jadup sebanyak 30 peserta
- 13. Sosialisasi bagi penerima bantuan UEB FM daerah tertinggal dan pesisir sebanyak 65 Peserta.
- 14. Memberikan bantuan Kube FM pengembangan sebanyak 30 orang dengan perincian berupa mesin bajak sawah di Kab Kerinci kepada 10 orang , bantuan ternak ikan di kab Batanghari dan Ternak Sapi di Kabupaten Merangin masing masing 10 orang serta sosialisasi kepada penerima bantuan KUBE –PM pengembangan sebanyak 35 orang.

d. Pelaksanaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Melakukan penataan Administrasi kependudukan melalui penyusunan buku kependudukan persemester Tk.Provinsi Jambi, melakukan sosialisasi pendaftaran penduduk Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi dan melakukan Koordinasi ,pembinaan dan fasilitasi Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota seProvinsi Jambi.
- Meningkatkan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten /Kota.
- Melaksanakan pemanfaatan Database kependudukan dengan menyusun Profil Kependudukan, Pemanfaatan Data Kepemndudukan Provinsi Jambi dan pengelolaan Siatem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Jambi.

3.3 ANALISIS KINERJA.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Analisis akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dapat dilakukan dengan mencermati hasil pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang terdapat dalam setiap program berikut adalah program dan kegiatan yang ada dalam program kerja Dinas Sosial ,Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Tabel. 1
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2018

N O	PROGRAM	Keu (%)	Fisik (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,26	91,32
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	96,43	97,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	99,86	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92,56	92,85
5.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial lainnya	97,30	97,46
6.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	89,63	90,19
7.	Program Perlindungan, Pelayanan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	90,25	91,51
8.	Pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, bantuan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	92,74	95,06
9.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	83,42	83,42
		91,76	92,88

Prosentase capaian program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi adalah 91,76 % untuk keuangan dan 92,88 % untuk Fisik. Dengan Nilai Dana Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 12.081.401.000,- dan penyerapan dana sebesar Rp. 11.085.935.427,- serta Sisa anggaran yang tidak terpakai senilai Rp. 995.465.573,-

Kegiatan – Kegiatan Prioritas Dan Unggulan/ Penghargaan

Pada Tahun 2018 Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi juga telah melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Bantuan Pengembangan KUBE Fakir Miskin

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Pembentukan/ Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Pengembangan KUBE bagi Fakir Miskin Perkotaan, Pedesaan dan Pesisir dilaksanakan dengan memberikan Hand Tractor, Alat Pertukangan, Usaha Batik, Usaha Laundry, Usaha Ternak Ayam, dan Usaha Tangkap Ikan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

2. Bantuan Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan Unit pelayanan Sosial keliling bagi penyandang Disabilitas di 2 Kabupaten yaitu kabupaten Kerinci dan kota sungai penuh dan pada kesempatan ini, telah disalurkan Kursi Roda, Tongkat/Kruk, Alat Bantu dengar, Tongkat Putih/Raba dan Walker untuk Penyandang Disabilitas tersebut.

Pada kegiatan untuk penyandang disabilitas lainnya, juga diberikan kaki/tangan palsu (Prothease), Pemenuhan kebutuhan dasar (sembako), dan bantuan Usaha ekonomi produktif dengan harapan pemenuhan kebutuhan dasar dan berlangsungnya keberfungsian sosial bagi disabilitas.

3. Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

Pada tahun 2018 Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Luhur” Provinsi Jambi melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar sebanyak 72 orang dengan mutasi sebanyak 14 orang meninggal dan sebanyak 13 orang masuk baru.

4. Pembinaan Anak Terlantar Dalam Panti

Pembinaan anak terlantar putus sekolah dalam panti melalui PSAWEP sebanyak 100 orang yang terbagi menjadi 2 angkatan dan alat yang diberikan adalah 20 Kompresor beserta stik, 20 otomotif, 20 trafo, 20 alat alat salon dan 20 menjahit, sesuai dengan bidang minat meliputi praktek belajar kerja perbengkelan, pertukangan, salon, dan tata busana.

5. Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Dalam Panti

Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial dalam panti sebanyak 12 orang selama 1 tahun dengan rincian 8 orang perlengkapan salon dan 4 orang perlengkapan menjahit.

6. Pelayanan Rehabilitasi Eks psikotik

Pelayanan dan rehabilitasi diberikan kepada 10 orang klien ekspsikotik berjenis kelamin perempuan dikarenakan kondisi pantiyang masih bergabung dengan eks Tuna susila di Panti Talangbakung, prosedur pelayanan meruapakan rujukan dari RSJ yang sudah dinyatakan sembuh dan diberikan rehabilitasi sosial dengan harapan meningkatkan keberfungsian sosial eks psikotik tersebut agar bis amejalanakn fungsi dan peranan di dalam masyarakat bila saatnya nanti kembali ketengah masyarakat

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

7. Pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Provinsi Jambi

.Dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2018 dan pada kesempatan ini diberikan penghargaan kepada yang tersebut ditabel ini :

DAFTAR REKAPITULASI PENGHARGAAN DAN BANTUAN SOSIAL YANG DISERAHKAN GUBERNUR JAMBI PADA ACARA HKSNDAN HDI PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

No.	Uraian	Jenis	Volume	Diserahkan kepada
I.	PENYERAHAN PENGHARGAAN, DAN BANSOS-BANSOS PADA PUNCAK HKSNDAN HDI			
A.	PIAGAM PENGHARGAAN			
1	Penghargaan kepada Walikota Jambi atas kontribusinya meningkatkan jumlah KPM Graduasi Mandiri PKH	Piagam	1 buah	Walikota Jambi
2	Penghargaan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur atas kontribusinya meningkatkan jumlah KPM Graduasi Mandiri PKH	Piagam	1 buah	Bupati Tanjung Jabung Timur
3	Penghargaan kepada Bupati Kerinci atas kontribusinya meningkatkan jumlah KPM Graduasi Mandiri PKH	Piagam	1 buah	Bupati Kerinci
4	Penghargaan kepada 8 Dunia Usaha yang tergabung dalam Forum CSR Provinsi Jambi atas kontribusinya dalam upaya memajukan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jambi	Piagam	8 buah	PT. Nan Riang, PTPN VI Jambi, PT. Trans GAS Indonesia, Paguyuban Sinar Mas, PT. Nan Riang Sari, PT. WKS, PT. Petrochina
B.	BANTUAN-BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI DANA APBN DAN APBD TAHUN 2018			
1	Penyerahan Bantuan Sosial dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial an. Gubernur Jambi kepada KPM PKH di Provinsi	Simbolik/ Sterofoam	Rp. 193.405.374.550 kepada 105.047 KPM (Tahap I s.d III-2018)	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

	Jambi Tahun 2018			
2	Penyerahan Kartu KKS bagi KPM PKH	Kartu KKS	1 buah	1 (satu) orang Perwakilan KPM PKH Kota Jambi
3	Penyerahan Bantuan Sosial dari Direkotrat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial an. Gubernur Jambi kepada Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 2.069.000.000	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4	Penyerahan Bantuan Sosial dari Direkotrat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial an. Gubernur Jambi kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 835.000.000	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5	Penyerahan Bantuan Sosial dari Direkotrat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif an. Gubernur Jambi kepada 8 LKS	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 400.000.000	Yayasan Zulyaden Darul Aufa (Perwakilan)
6	Penyerahan Bantuan Sosial dari Direkotrat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berupa Pendampingan dan Perawatan Lansia di Keluarga (Home Care) an. Gubernur Jambi kepada 10 LKS	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 300.000.000	LKS Budi Ashi (Perwakilan)
7	Penyerahan Bantuan Sosial melalui Dana APBD Provinsi Jambi dari Gubernur Jambi kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir di Provinsi Jambi	Simbolik/ Sterofoarm	Rp.160.000.000	Perwakilan KUBe Kota Jambi (Dari Masyarakat)
8	Penyerahan Bantuan Sosial melalui Dana APBN Kementerian Sosial an. Gubernur Jambi kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir di Provinsi Jambi	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 2.000.000.000	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

9	Penyerahan Bantuan Sosial berupa JADUP bagi Warga KAT Kabupaten Tebo an.Gubernur Jambi kepada Dinas Sosial Kab. Tebo	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 336.000.000	Kepala Dinas Sosial Kab. Tebo (Perwakilan KAT)
10	Penyerahan Bantuan Sosial berupa JADUP bagi Warga KAT Kabupaten Sarolangun an.Gubernur Jambi kepada Dinas SosialKab. Sarolangun	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 30.600.000	Kepala Dinas Sosial Kab. Sarolangun (Perwakilan KAT)
11	Penyerahan Bantuan Hubah Barang (10 Mesin Jahit) bagi Anak Terlantar yang mendapat keterampilan dalam Panti PSBAWEP kepada Salah satu perwakilan Anak Terlantar	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 17.500.000	1 (satu) orang Perwakilan Anak Terlantar Sdri. Winda Yulia Putri
12	Penyerahan Bantuan Hibah Barang berupa 8 Paket Peralatan Tata Rias bagi Penyandang Eks. Tuna Susila pada Panti PSBAWEP kepada Salah satu perwakilan Siswa Eks. Tuna Susila	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 12.000.000	1 (satu) orang Perwakilan Eks. Tuna Susila, Sdri. Yeyen
13	Penyerahan Bantuan Hibah Barang berupa 4 Unit Mesin Jahit bagi Penyandang Eks. Tuna Susila pada Panti PSBAWEP kepada Salah satu perwakilan Siswa Eks. Tuna Susila	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 6.000.000	1 (satu) orang Perwakilan Eks. Tuna Susila, Sdri. Endang
14	Penyerahan Bantuan Hibah Barang berupa 10 Unit Travo Inferter bagi Anak Terlantar pada Panti PSBAWEP kepada Salah satu perwakilan Siswa Anak Terlantar	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 17.500.000	1 (satu) orang Perwakilan Anak Terlantar, Sdr. Ahyarudin
15	Penyerahan Bantuan Hibah Barang berupa 10 paket Peralatan Tata Rias bagi Anak Terlantar pada Panti PSBAWEP kepada Salah satu perwakilan Siswa Anak Terlantar	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 17.500.000	1 (satu) orang Perwakilan Anak Terlantar, Sdr. Inggi Atika
16	Penyerahan Bantuan Hibah Barang berupa 9 Unit Mesin Jahit bagi Anak Terlantar pada Panti PSBAWEP kepada Salah satu	Simbolik/ Sterofoarm	Rp. 15.750.000	1 (satu) orang Perwakilan Anak Terlantar, Sdri. Winda Yulia Putri

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

	perwakilan Siswa Anak Terlantar			
17	Penyerahan Bantuan Hibah Barang berupa 10 Paket Kompressor 1/2 PK bagi Anak Terlantar pada Panti PSBAWEP kepada Salah satu perwakilan Siswa Anak Terlantar	Simbolik/ Sterofoam	Rp. 17.500.000	1 (satu) orang Perwakilan Anak Terlantar, Sdr. Kaswanto
B. BANTUAN-BANTUAN SOSIAL DARI CSR				
1	Penyerahan Bantuan Sosial dari Petrochina Jabung Ltd. kepada Panti Jompo PSTW Budi Luhur berupa 2 buah mesin cuci	Simbolik/ Sterofoam	Rp. 9.100.000	Kepala Panti UPTD PSTW Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
2	Penyerahan Bantuan Sosial dari Perum Pegadaaian Jambi kepada Panti Jompo PSTW Budi Luhur berupa 2 buah mesin cuci	Simbolik/ Sterofoam	Rp. 5.000.000	Kepala Panti UPTD PSTW Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
3	Penyerahan Bantuan Sosial dari PT. Wira Karya Sakti kepada Panti PSBAWEP Harapan Mulia berupa 1 buah TV LED	Simbolik/ Sterofoam	Rp. 5.000.000	Kepala Panti UPTD PSBAWEP Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
4	Penyerahan Bantuan Sosial dari PT. Nan Rieng Sari kepada Panti Jompo PSBAWEP Harapan Mulia berupa 5 Unit Mesin Pompa Air	Simbolik/ Sterofoam	Rp. 2.500.000	Kepala Panti UPTD PSBAWEP Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
5	Penyerahan Bantuan Sosial dari Ketua Forum CSR Provinsi Jambi kepada Panti Jompo PSTW Budi Luhur berupa 1 buah kulkas	Simbolik/ Sterofoam	Rp. 1.500.000	Kepala Panti UPTD PSTW Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
6	Penyerahan Bantuan Sembako dan Kain Sarung dari Paguyuban Sinar Mas sebanyak 140 pcs	Paket	Rp. 21.000.000	Sembako dan kain sarung diserahkan kepada 1 (satu) orang perwakilan Veteran
No.	Uraian	Jenis	Volume	Diserahkan kepada
II.	PENYERAHAN BANSOS PADA PUNCAK ACARA HARI DISABILITAS INTERNASIONAL			
A.	BANTUAN SOSIAL			

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

1	Penyerahan Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda, Kaki Palsu, Alat Bantu Dengar, dll)	Alat Bantu	400 buah	Perwakilan Disabilitas

8. Pencapaian Target Perekaman E-KTP dan Akta Kelahiran

Tabel 2
Realisasi Target Perekaman E-KTP dan Akta Kelahiran
Di Provinsi Jambi

Per- Desember 2018

NO	URAIAN	JUMLAH		%
1.	PENDUDUK PROV JAMBI	3.469.230	Jiwa	-
2.	KEPALA KELUARGA	1.026.698	KK	-
3.	WAJIB KTP	2.447.265	JIWA	-
4.	TELAH MEREKAM KTP EL	2.222.454	JIWA	90,81
5.	BELUM MEREKAM	224.811	JIWA	9,19
6.	AKTA KELAHIRAN	1.151.157	JIWA	98,84

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa perekaman E-KTP belum mencapai target 100% sebagaimana target nasional hal ini disebabkan karena berbagai kendala diantaranya peralatan rusak, lokasi sulit dijangkau serta keterbatasan jumlah petugas.

Sementara target akte kelahiran telah melebihi target nasional yaitu 98,84 %. Hal ini menandakan bahwa masyarakat provinsi Jambi memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya dokumen akta kelahiran.

9. Pelaksanaan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan)

GISA merupakan sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi Kependudukan, dan kesadaran tersebut diwujudkan melalui 4 hal, yaitu sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.

GISA Provinsi Jambi dilaksanakan pada 17sd 19 April 2018 bertempat di halaman kantor Gubernur Jambi yang pada kesempatan ini melayani 8000 rekam dan cetak kartu identitas masyarakat

3.4 KENDALA DAN MASALAH

Adapun beberapa kendala dan permasalahan saat ini adalah sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. Tingkat kemiskinan penduduk masih tinggi dan
2. Masih rendahnya semangat kerja, motivasi untuk mengadakan perubahan serta kreativitas untuk melakukan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.
3. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas.
4. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
5. Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program-program pembangunan di Kab/Kota.

B. Faktor Eksternal

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial yang prima.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber yang ada disekitarnya
3. Kondisi geografis Provinsi Jambi yang rawan bencana dan terisolir serta penyebaran penduduk yang tidak merata.
4. Belum optimalnya upaya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.

3.5 LANGKAH – LANGKAH ANTISIPATIF

Masalah adalah ketimpangan antara kebutuhan dan sumber. Baik masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi keterbelakangan maupun masalah sosial akibat kurangnya kesempatan kerja, semuanya berakibat pada semakin terpuruknya kemampuan masyarakat penyandang masalah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemerintah selalu berusaha mengatasi masalah tersebut melalui prioritas-prioritas Nasional sehingga seluruh masalah yang terasa oleh masyarakat dan menjadi hambatan dalam pembangunan dapat diatasi secara bertahap. Melalui program dan anggaran Kementerian Sosial dan Dirjen Otda Kepmendagri maka baik kondisi maupun jumlah sebaran masalah dapat dikurangi.

Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia selalu dilakukan melalui pelatihan pelatihan serta bimbingan teknis melalui instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kemampuan dan berkompeten melakukan pelatihan serta bimbingan teknis tersebut.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) i Pemerintah merupakan wujud dari pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial ,Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada Tahun 2018 atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi dengan beserta pembiayaannya. Laporan Kinerja Dinas Sosial ,Kendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dikemukakan dalam laporan ini, telah mencoba menggambarkan kinerja yang telah dicapai berdasarkan alokasi dana dari kegiatan yang ditetapkan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu dan analisa pencapaian kinerja, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun pelaksanaan kegiatan rutin dan proyek dapat disampaikan sebagai berikut :Prosentase capaian program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi adalah 91,76 % untuk keuangan dan 92,88 % untuk Fisik. Dengan Nilai Dana Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 12.081.401.000,- dan penyerapan dana sebesar Rp. 11.085.935.427,- serta Sisa anggaran yang tidak terpakai senilai Rp. 995.465.573,-Dari hasil perhitungan pencapaian kinerja tersebut diatas masih diperlukan masukan-masukan untuk proses penyusunan Laporan Akuntabilitas ditahun mendatang.

Jambi, Februari 2019

KEPALA DINAS,

ARIEF MUNANDAR,SE

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosialdukcapil 2018

Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 196703071999031004

